



Rencana Kerja Perubahan

RENJA

TAHUN 2021

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Kompleks Perkantoran Bupati Gedung Kembar B Lantai Dasar
Jalan Wolter Monginsidi, Telp. (0541) 662295-6666380

KATA PENGANTAR

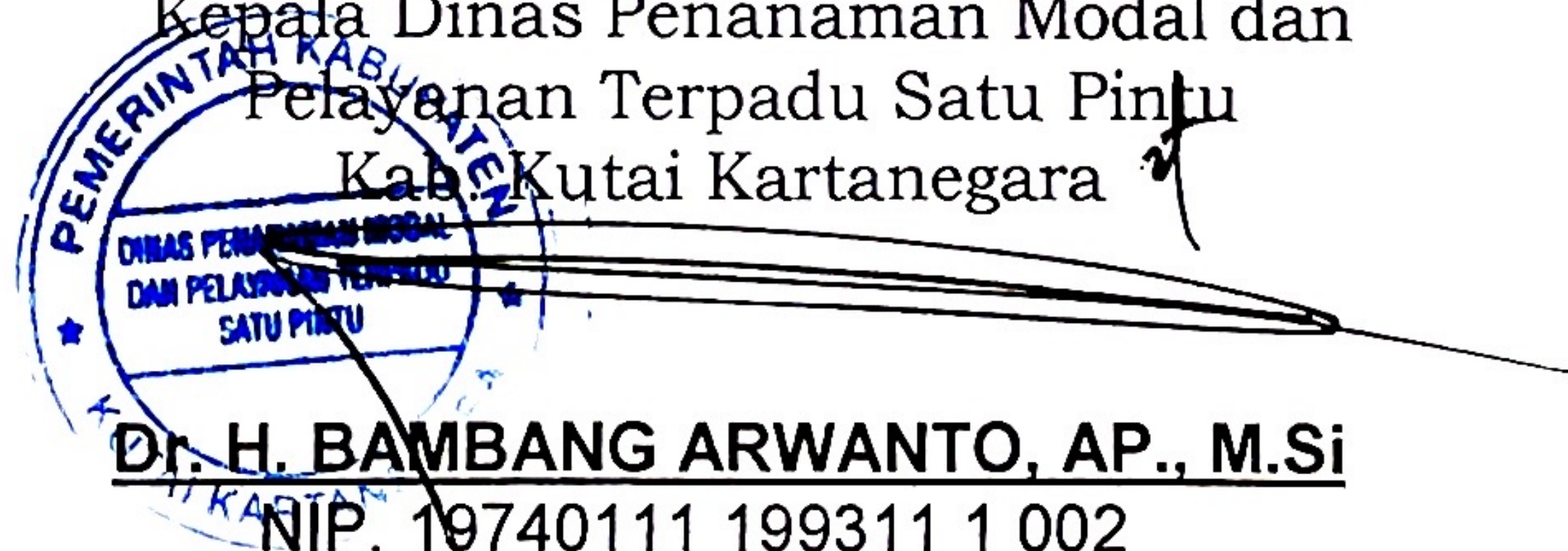
Dengan memanjatkan Puji syukur Alhamdulillah Allah SWT atas berkat dan rahmat-Nya, kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2021.

Rencana Kerja (RENJA) ini memuat evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2021, capaian Renstra, analisis kinerja pelayanan, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi, tujuan dan sasaran serta program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Kartanegara.

Kami menyadari Rencana Kerja (RENJA) ini masih belum sempurna, oleh karena itu kami mengharapkan saran masukan dari semua pihak yang berkepentingan dalam rangka perbaikan selanjutnya.

Diharapkan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Kartanegara 2021 ini dapat dijadikan acuan pencapaian kinerja dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Kartanegara, yang pada akhirnya diharapkan dapat menunjang tercapainya visi Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara ***“Terwujudnya Kabupaten Kutai Kartanegara yang Maju, Mandiri, Sejahtera dan Berkeadilan”***

Tenggarong, 12 Agustus 2021
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kab. Kutai Kartanegara



Dr. H. BAMBANG ARWANTO, AP., M.Si
NIP. 19740111 199311 1 002

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, setiap Perangkat Daerah (PD) diwajibkan menyusun dokumen perencanaan dalam bentuk Rencana Kerja (RENJA) untuk periode selama 1 (satu) tahun sebagai langkah strategis dalam mewujudkan hasil-hasil pembangunan yang ingin capai dalam perencanaan jangka menengah.

Rencana Kerja (RENJA) ini merupakan terjemahan perencanaan strategis 5 (lima) tahunan yang dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) SKPD Perencanaan pembangunan tersebut dirumuskan secara transparan, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan serta mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah (PD) dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Renstra Organisasi Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati.

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2022 berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Tahun 2021 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Kartanegara, yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perijinan Terpadu di Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
16. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Kalimantan Timur 2005–2025;
17. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2013-2033;
18. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kutai Kartanegara.
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pemetaan Kewenangan Urusan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016 Nomor 72).
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2016, Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

21. Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016 Nomor 73);
22. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Kartanegara.

1.3. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Maksud penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Kartanegara adalah untuk menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolak ukur penilaian kinerja dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2021

b. Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Kartanegara adalah untuk merumuskan program dan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Kartanegara selama tahun 2021

.

1.4. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan dan Sistematika Penulisan.

BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN 11 TAHUN 2021

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD bab memuat kajian (review) terhadap hasil Pelaksanaan RENJA – PD Tahun 2020 samapi dengan Triwulan II dan perkiraan capaian tahun berjalan 2021, mengacu pada APBD Tahun berjalan.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Program dan Kegiatan Bab ini menguraikan Kebijakan Terhadap Kebijakan Program Nasional, Tujuan dan Sasaran PD..

BAB IV PENUTUP

Bab ini menguraikan kesimpulan dokumen Rencana Kerja (RENJA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022.

BAB II
EVALUASI RENJA SAMAPI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2021

2.1. Evaluasi Pelaksanaan RENJA PD

Evaluasi Pelaksanaan RENJA DPMPTSP Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 dan Capaian RENSTRA DPMPTSP Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021, ada beberapa kegiatan yang direncanakan namun tidak dapat dilaksanakan dan mengalami perubahan kegiatan dikarenakan adanya pandemi covid-19, pada Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi yaitu kegiatan promosi melalui pameran 4 event menjadi 1 event, anggaran dilakukan perubahan pada pengadaan peralatan gedung kantor dalam rangka peningkatan sarana dan prasarana promosi ke depan

Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan RENJA Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 dan Capaian RENSTRA serta Pengukuran capaian kinerja tentang pelaksanaan Renja dan capaian Renstra Tahun 2021 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Kartanegara dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dengan realisasinya dan pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan, diuraikan pada tabel 1 berikut :

TABEL 1

**REKAPTULASI HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA Perangkat Daerah 2021 dan
DAN Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021 (tahun berjalan)
Kabupaten Kutai Kartanegara
(Mapping Renstra Perangkat Daerah Sesuai Kepmendagri 050-3708)**

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Lembar :

Kode					Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	target kinerja capaian program (Renstra - PD) Tahun 2021	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun (2020)	Target dan realisasi kinerja program dan kkegiatan Tahun Berjalan (2020)			Catatan Penting	Perkiraan realisasi capaian target Renstra -PD s/d tahun berjalan (2021)	
									Target RENJA - PD TAHUN (2021)	Realisasi RENJA - PD Triwulan II	Tingkat Realisasi (%)		realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2021)	tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11=(10/4)*
2	18	1			Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota									
2	18	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Penganggaran & Evaluasi Kinerja								
2	18	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen	2		2	1	50%		1	50%

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

2021

2	18	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD	Jumlah dokumen	1		1				1	100%
2	18	1	2.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahann RKA - SKPD	Jumlah dokumen	1		1				1	100%
2	18	1	2.01	4	Koordinasi Dan Penyusunan DPA - SKPD	Jumlah dokumen	1		1				1	100%
2	18	1	2.01	5	Koordinasi Dan Penyusunan Perubahan DPA - SKPD	Jumlah dokumen	1		1				0	0%
2	18	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen	6		6				3	50%
2	18	1	2.02		Adiminstrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Keuangan								
2	18	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN	91		91	91	100%		7	8%
2	18	1	2.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Pendukung Non ASN	46		46				7	15%
2	18	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen	1		1				0	0%
2	18	1	2.02	6	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Tanggapan	6		6				0	0%
2	18	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen	3		3				0	0%
2	18	1	2.02	8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah dokumen Arsip	1		1				0	0%

2	18	1	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi BMD								
2	18	1	2.03	1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah paket pengadaan perlengkapan gedung kantor	1		1				0	0%
2	18	1	2.03	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah paket pengadaan peralatan gedung kantor	2		2				0	0%
2	18	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Kepegawaian								
2	18	1	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Aparatur	15		15				0	0%
2	18	1	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - Undangan	Jumlah Aparatur	50		50				0	0%
2	18	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Umum								
2	18	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	35		35				0	0%
2	18	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik	25		25				25	100%
2	18	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan	Jumlah jenis barang cetakan	22		22				0	0%

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

2021

2	18	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	Jumlah eksemplar	500		500				225	45%
2	18	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat Koordinasi/Konsultasi	200		200				40	20%
2	18	1	2.06	10	Pengelolaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah arsip	500		500				0	0%
2	18	1	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah kegiatan/berita	24		24				0	0%
2	18	1	2.07		Pengelolaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Pengadaan BMD								
2	18	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah paket	5		5				0	0%
2	18	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Pemeliharaan BMD								
2	18	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai	250		250				228	91%
2	18	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Periode	12		12				5	42%
2	18	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis peralatan	50		50				5	10%
2	18	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Pemeliharaan BMD								
2	18	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan pajak Kendaraan Perorangan Dinas	Jumlah unit pemeliharaan kendaraan	48		48				12	25%

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

2021

					atau Kendaraan Dinas Jabatan									
2	18	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit	60		60				15	25%
2	18	2			Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Jumlah Proyek (PMA/PMDN)								
2	18	2	2.02		Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota									
2	18	2	2.02	2	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen	1		1				0	0%
2	18	3			Program Promosi Penanaman Modal	Jumlah Investor (PMA/PMDN)								
2	18	3	2.01		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota									
2	18	2	2.02	2	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	mengikuti pameran promosi dalam daerah, luar daerah, dalam negeri dan luar negeri	3		3				0	0%
2	18	4			Program Pelayanan Penanaman Modal	Jumlah Penerbitan Izin								

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

2021

2	18	4	2.01		Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota									
2	18	4	2.01	1	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah perizinan dan Non perizinan	40		40				0	0%
2	18	4	2.01	2	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah perizinan dan Non perizinan	40		40				0	0%
2	18	4	2.01	3	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah perizinan dan Non perizinan	40		40				0	0%
2	18	4	2.01	4	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah perizinan dan Non perizinan	40		40				0	0%
2	18	5			Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Kenaikan /Penurunan Nilai Realisasi PMDN								

2	18	5	2.01		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota									
2	18	5	2.01	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Perusahaan yang dipantau	20		20				1	5%
2	18	5	2.01	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Perusahaan yang dibina	20		20				1	5%
2	18	5	2.01	3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Perusahaan yang diawasi	20		20				1	5%
2	18	6			Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Jumlah Aplikasi								
2	18	6	2.01		Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota									
2	18	6	2.01	1	Pengelolaan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha terintegrasi secara Elektronik	SDM dan Aplikasi	69		69				7	10%

TABEL 1
REKAPTULASI HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA Perangkat Daerah 2021 dan
DAN Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021 (tahun berjalan)
Kabupaten Kutai Kartanegara
(Mapping Renstra Perangkat Daerah Sesuai Kepmendagri 050-3708)

DINAS PENANANAM MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Urusan/bidang urusan Program / Kegiatan / Renstra OPD	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan	Indikator kinerja	Target Kinerja Capaian Tahun 2021	Realisasi Target kinerja		Target dan Realisasi Pagu Tahun Berjalan (2021)			Keterangan
				K	%	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Tingkat Realisasi (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=5/4*100)	(7)	(8)	9=(8/7)	
Urusan Pemerintah Bidang Penanaman Modal						16.806.834.628,00			
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota					14.779.969.828,00			
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Penganggaran & Evaluasi Kinerja				284.999.800,00			
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat	Jumlah dokumen	2	1	50%	65.000.000,00	28.720.000,00	44%	

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

2021

	Daerah								
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD	Jumlah dokumen	1	0	0%	24.999.800,00	24.219.800,00	97%	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahann RKA - SKPD	Jumlah dokumen	1	0	0%	20.000.000,00	20.000.000,00	100%	
	Koordinasi Dan Penyusunan DPA - SKPD	Jumlah dokumen	1	0	0%	20.000.000,00	19.220.000,00	96%	
	Koordinasi Dan Penyusunan Perubahan DPA - SKPD	Jumlah dokumen	1	0	0%	20.000.000,00	20.000.000,00	100%	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen	6	3	50%	135.000.000,00	135.000.000,00	100%	
	Adiminstrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Keuangan				11.880.283.426,00			
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN	91	91	100%	10.586.334.158,00	5.962.649.104,00	56%	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Pendukung Non ASN	46	46	100%	893.949.748,00	397.014.290,00	44%	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen	1	1	100%	65.000.000,00	35.483.300,00	55%	
	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Tanggapan	6	6	100%	19.999.800,00	-	0%	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen	3	3	100%	284.999.720,00	107.398.200,00	38%	
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah dokumen Arsip	1	1	100%	30.000.000,00	-	0%	

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

2021

	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi BMD				54.998.800,00			
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah paket pengadaan perlengkapan gedung kantor	1			14.999.000,00	-	0%	
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah paket pengadaan peralatan gedung kantor	2			39.999.800,00	-	0%	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Kepegawaian				350.000.000,00			
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Aparatur	15			100.000.000,00	-	0%	
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - Undangan	Jumlah Aparatur	50			250.000.000,00	-	0%	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Umum				1.186.327.440,00			
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	35			153.852.620,00	138.675.400,00	90%	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik	25			14.997.000,00	14.997.000,00	100%	
	Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan	Jumlah jenis barang cetak	22			100.000.000,00	-	0%	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	Jumlah eksemplar	500			45.000.000,00	9.500.000,00	21%	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan	Jumlah rapat Koordinasi/Konsultasi	200				118.067.676,00	20%	

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

2021

	Konsultasi SKPD	i				599.978.000,00			
	Pengelolaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah arsip	500			199.999.820,00	-	0%	
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah kegiatan/berita	24			72.500.000,00	-	0%	
	Pengelolaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Pengadaan BMD				360.081.810,00			
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah paket	5			360.081.810,00	23.500.000,00	7%	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Penyediaan Jasa				340.428.552,00			
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai	250			5.995.000,00	5.450.000,00	91%	
	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Periode	12			184.953.552,00	38.660.938,00	21%	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis peralatan	50			149.480.000,00	13.975.000,00	9%	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Pemeliharaan BMD				322.850.000,00			
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah unit pemeliharaan kendaraan	48			263.620.000,00	63.408.120,00	24%	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit	60			59.230.000,00	14.438.000,00	24%	

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

2021

	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Jumlah Proyek (PMA/PMDN)				99.999.800,00			
	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota					99.999.800,00			
	Pernyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen	1			99.999.800,00	-	0%	
	Program Promosi Penanaman Modal	Jumlah Investor (PMA/PMDN)				700.000.000,00			
	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota					700.000.000,00			
	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	mengikuti pameran promosi dalam daerah, luar daerah, dalam negeri dan luar negeri	3			700.000.000,00	2.800.000,00	0%	
	Program Pelayanan Penanaman Modal	Jumlah Penerbitan Izin				399.788.000,00			
	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota					399.788.000,00			
	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah perizinan dan Non perizinan	40			100.000.000,00	-	0%	

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

2021

	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah perizinan dan Non perizinan	40			100.000.000,00	8.725.000,00	9%	
	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah perizinan dan Non perizinan	40			99.788.000,00	-	0%	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah perizinan dan Non perizinan	40			100.000.000,00	4.920.000,00	5%	
	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Kenaikan /Penurunan Nilai Realisasi PMDN				635.173.000,00			
	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota					635.173.000,00			
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Perusahaan yang dipantau	20			210.000.000,00	7.822.000,00	4%	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Perusahaan yang dibina	20			210.000.000,00	5.586.000,00	3%	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Perusahaan yang diawasi	20			215.173.000,00	4.020.000,00	2%	
	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Jumlah Aplikasi				191.904.000,00			

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

2021

	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					191.904.000,00			
	Pengelolaan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha terintegrasi secara Elektronik	SDM dan Aplikasi	69			191.904.000,00	18.693.100,00	10%	

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perangkat Daerah

Pada tahun 2021, target untuk indikator kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu telah terpenuhi sebagaimana yang tercantum pada capaian kinerja pelayanan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Kartanegara. Target tersebut kemudian mengalami perubahan pada tahun berikutnya. Namun, kondisi ekonomi yang tidak menentu pada tahun 2020 yang disebabkan oleh wabah Covid-19 dan isu politik lainnya, akan menyulitkan pencapaian target pada tahun berjalan ini sehingga juga menggeser perkiraan capaian realisasi.

Dalam kondisi umum, pencapaian kinerja pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Kartanegara dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagai organisasi perangkat daerah urusan penanaman modal, maka Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2021 dengan 7 (tujuh) indikator kinerja, diuraikan pada tabel 2 berikut :

TABEL. 2

**PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

No	Indikator	SPM/st andar nasiona l	IKK	Target Renstra SKPD					Realisas i Capaian Tahun 2020	Proyeksi		Catat an Anali sis
				Tahu n 2017	Tahun 2018	Tahu n 2019	Tahu n 2020	Tahu n 2021		Tahun 2020	Tahun 2021	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah			68,00	70,00	75,00	80,00	80,00	75,88%	77,25	80,75	
2	Tingkat Pertumbuhan Nilai Investasi (PMDN/PMA)			1,54 %	1,59%	1,65 %	1,68 %	1,68 %	68,59%	2,00%	3,00 %	
3	Jumlah Investor Baru (PMDN / PMA)			40	42	44	48	48	330	72	80	
4	Jumlah/target Penanaman Modal PMDN/PMA (Triliyun Rupiah)			3,14	3,17	3,20	3,23	3,23	6,60%	3,69	3,75	
5	Realisasi Penanaman Modal (PMDN/PMA)			87%	90%	95%	100%	100%	100%	100%	100 %	
6	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			80 (Sangat Baik)	83 (Sangat Baik)	85 (Sangat Baik)	87 (Sangat Baik)	87 (Sangat Baik)	93,25 (Sangat Baik)	87 (Sangat Baik)	88 (Sangat Baik)	
7	Rata-rata lama Pengurusan Perizinan dan Nonperizinan (jam)			1,08	1,04	1,00	0,97	0,97	0,82	0,82	0,82	

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Program dan Kegiatan

- a. Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kutai Kartanegara berupaya memberikan pelayanan yang mudah dan cepat kepada pelaku usaha dan mendorong kemudahan berinvestasi bagi para calon investor di Kutai Kartanegara. Program dan kegiatan yang disusun untuk tahun 2021 merupakan perwujudan dari usaha untuk mendukung visi dan misi Bupati Kutai Kartanegara. Untuk mewujudkan iklim investasi daerah yang kondusif, Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kutai Kartanegara menyusun kegiatan dengan fokus kepada pemetaan potensi investasi daerah, insentif/fasilitasi kemudahan berusaha, promosi dan pelayanan perizinan.
- a. Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kutai Kartanegara pada tahun 2021, pada awalnya disusun sebanyak 4 (empat) program. Namun dengan terbitnya PERMENDAGRI Nomor 90 Tahun 2019, dilakukan beberapa penyesuaian sehingga tidak lagi sesuai dengan RENSTRA 2016-2021, menjadi 5 (lima) program, yaitu :
 - (1) Program Pengembangan Iklim Investasi Penanaman Modal,
 - (2) Program Promosi Penanaman Modal
 - (3) Program Pelayanan Penanaman Modal,
 - (4) Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal,
 - (5) Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah merupakan program yang berfokus pada kegiatan-kegiatan rutin penunjang penyelenggaraan

pemerintahan yang terdiri dari kegiatan administrasi umum, peningkatan disiplin dan kapasitas sumberdaya aparatur, perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah, dan kegiatan administrasi keuangan. Program promosi penanaman modal berfokus pada kegiatan penyelenggaraan promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah provinsi. Program ini diarahkan untuk mencapai target indikator jumlah investor, nilai investasi, daya serap tenaga kerja dan kenaikan/ penurunan nilai realisasi investasi PMDN dan PMA. Program pengembangan iklim penanaman modal diarahkan pada kegiatan penetapan pemberian fasilitas/ insentif dibidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten, dan kegiatan pembuatan peta potensi investasi Kabupaten. Hasil RENJA 2021 Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kutai Kartanegara dari kegiatan dalam program ini nantinya akan memudahkan investor dalam menentukan nilai investasi dan menjadi acuan pengukuran kenaikan/ penurunan nilai realisasi investasi. Program pelayanan penanaman modal berfokus pada kegiatan penanaman modal yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan menjadi kewenangan daerah Kutai Kartanegara. Kegiatan ini bertujuan memberikan kemudahan dalam proses perizinan bagi investor dan akses pengaduan masyarakat. Program pengendalian pelaksanaan penanaman modal berfokus pada kegiatan pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten, bertujuan untuk memantau pelaksanaan penanaman modal di Kabupaten Kutai Kartanegara. Program pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal berfokus pada kegiatan urusan pengelolaan data dan informasi perizinan dan nonperizinan penanaman modal yang terintegrasi pada tingkat daerah Kabupaten, Provinsi dan Nasional. Rencana Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2022 disusun dengan memperhatikan target capaian kinerja sasaran yang telah ditetapkan

dalam rencana strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2021. Untuk tahun 2022 terdiri dari 5 (lima) program dan 39 (tiga puluh sembilan) sub kegiatan dengan kebutuhan dana sesuai dengan pagu indikatif yang telah diusulkan adalah sebesar Rp. **19.983.370.644,00** dengan sumber dana dari APBD Kabupaten Kutai Kartanegara, diuraikan pada tabel berikut :

Tabel 5

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan PD Tahun 2021
dan Perkiraan Maju Tahun 2022
Kabupaten Kutai Kartanegara

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu

Kode					Sebelum Perubahan (APBD) Kepmendagri 050-3708 Tahun 20021				Sesudah Perubahan (APBD) Kepmendagri 050-3708 Tahun 20021				Bertambah/Berkurang	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022	
					Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Lokasi	Pagu Indikatif	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Lokasi	Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Urusan Pemerintah Bidang Penanaman Modal							16.806.834.628 ,00				18.265.868.375 ,00	1.459.033.747,00		19.983.370.644 ,00
2	1	8	1		Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			14.779.969.828 ,00				16.089.003.575 ,00			15.583.370.644 ,00
2	1	8	1	2.0 1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Penganggaran & Evaluasi Kinerja		284.999.800,00	Jumlah Dokumen Perencanaan Penganggaran & Evaluasi Kinerja			383.466.520,00			285.000.000,00
2	1	8	1	2.0 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan PD	2	OPD	65.000.000,00	Jumlah Dokumen Perencanaan PD	2	OPD	57.440.000,00	2 Dokumen	65.000.000,00

2	1 8	1	2.0 1	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD	Jumlah Dokumen RKA - SKPD	1	OPD	24.999.800,00	Jumlah Dokumen RKA - SKPD	1	OPD	24.219.800,00		1 Dokumen	25.000.000,00
2	1 8	1	2.0 1	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahann RKA - SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	OPD	20.000.000,00	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	OPD	19.220.000,00		1 Dokumen	20.000.000,00
2	1 8	1	2.0 1	4	Koordinasi Dan Penyusunan DPA - SKPD	Jumlah Dokumen DPA - SKPD	1	OPD	20.000.000,00	Jumlah Dokumen DPA - SKPD	1	OPD	19.220.000,00		1 Dokumen	20.000.000,00
2	1 8	1	2.0 1	5	Koordinasi Dan Penyusunan Perubahan DPA - SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	OPD	20.000.000,00	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	OPD	19.220.000,00		1 Dokumen	20.000.000,00
2	1 8	1	2.0 1	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja	6	OPD	135.000.000,00	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja	6	OPD	244.146.720,00		6 Dokumen	135.000.000,00
2	1 8	1	2.0 2		Adiminstrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Keuangan			11.880.283.426,00				12.940.850.453,00	1.159.033.747,00		11.494.932.823,00
2	1 8	1	2.0 2	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN DPMTSP	91 Orang	OPD	10.586.334.158,00	Jumlah ASN DPMTSP	91 Orang	OPD	11.655.748.889,00	1.069.414.731,00	91 Orang	11.094.932.823,00
2	1 8	1	2.0 2	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Pendukung Non ASN	46 Orang	OPD	893.949.748,00	Jumlah Pendukung Non ASN	46 Orang	OPD	983.568.764,00	89.619.016,00		-

2	1 8	1	2.0 2	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja	1 Dokumen	OPD	65.000.000,00	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja	1 Dokumen	OPD	63.440.000,00		1 Dokumen	65.000.000,00
2	1 8	1	2.0 2	6	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen	5 Dokumen	OPD	19.999.800,00	Jumlah Dokumen	5 Dokumen	OPD	18.439.800,00		5 Dokumen	20.000.000,00
2	1 8	1	2.0 2	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen	3 Dokumen	OPD	284.999.720,00	Jumlah Dokumen	3 Dokumen	OPD	191.213.000,00		3 Dokumen	285.000.000,00
2	1 8	1	2.0 2	8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	OPD	30.000.000,00	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	OPD	28.440.000,00		1 Dokumen	30.000.000,00
2	1 8	1	2.0 3		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				54.998.800,00				54.998.800,00			54.999.000,00
2	1 8	1	2.0 3	1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	OPD	14.999.000,00	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	OPD	14.999.000,00		1 Dokumen	14.999.000,00
2	1 8	1	2.0 3	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen	2 Dokumen	OPD	39.999.800,00	Jumlah Dokumen	2 Dokumen	OPD	39.999.800,00		2 Dokumen	40.000.000,00
1 8	0 1	2.0 5		1	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Kepegawaian		OPD	350.000.000,00	Jumlah ASN DPMPTSP		OPD	350.000.000,00			350.000.000,00
1 8	0 1	2.0 5	09	2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Aparatur yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	15 Aparatur	OPD	100.000.000,00	Jumlah Pendukung Non ASN	15 Aparatur	OPD	100.000.000,00		15 Aparatur	100.000.000,00

18	01	205	11	5	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - Undangan	Jumlah Aparatur yang mengikuti Bimbingan	50 Aparatur	OPD	250.000.000,00	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja	50 Aparatur	OPD	250.000.000,00		50 Aparatur	250.000.000,00
18	01	205	02	6	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut kelengkapannya											
18	01	205	03	7	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian											
18	01	205	04	8	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian											
18	01	205	05	1	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai											
28	18	1	206		Administrasi Umum Perangkat Daerah				1.186.327.440,00				1.336.327.440,00	150.000.000,00		1.284.435.145,00
2	18	1	206	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Unit Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	35 Unit	OPD	153.852.620,00	Jumlah Unit Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	35 Unit	OPD	151.460.000,00		35 Unit	155.000.000,00
2	18	1	206	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis bahan logistik	25 Jenis	OPD	14.997.000,00	Jumlah Jenis bahan logistik	25 Jenis	OPD	14.997.000,00	-	25 Jenis	20.000.000,00
2	18	1	206	5	Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan	Jumlah jenis barang cetakan	22 Jenis	OPD	100.000.000,00	Jumlah jenis barang cetakan	22 Jenis	OPD	100.000.000,00	-	22 Jenis	100.000.000,00
2	18	1	206	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	Jumlah buah/ Eksemplar	500 Eksemplar	OPD	45.000.000,00	Jumlah buah/ Eksemplar	500 Eksemplar	OPD	45.000.000,00	-	500 Eksemplar	45.000.000,00
2	18	1	206	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi/Konsultasi	150 OK	OPD	599.978.000,00	Jumlah Rapat Koordinasi/Konsultasi	250 OK	OPD	749.978.000,00	150.000.000,00	200 OK	691.935.145,00

2	1 8	1	2.0 6	1 0	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Kegiatan	500 Dokumen	OPD	199.999.820,00	Jumlah Kegiatan	600 Dokumen	OPD	203.952.400,00		500 Dokumen	200.000.000,00
2	1 8	1	2.0 6	1 1	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Kegiatan/Berita	24 Berita	OPD	72.500.000,00	Jumlah Kegiatan/Berita	24 Berita	OPD	70.940.040,00		24 Berita	72.500.000,00
2	1 8	1	2.0 7		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Pengadaan BMD			360.081.810,00				360.081.810,00			361.000.000,00
2	1 8	1	2.0 7	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Paket Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	10 Paket	OPD	360.081.810,00	Jumlah Paket Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	10 Paket	OPD	360.081.810,00		10 Paket	361.000.000,00
2	1 8	1	2.0 8		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				340.428.552,00				340.428.552,00			1.430.153.676,00
2	1 8	01	2.0 8	0 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai/Prangko	2500 Lembar	OPD	5.995.000,00	Jumlah Materai/Prangko	2500 Lembar	OPD	5.995.000,00		2500 Lembar	5.995.000,00
2	1 8	01	2.0 8	0 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Priode Pembayaran	12 Bulan	OPD	184.953.552,00	Jumlah Priode Pembayaran	12 Bulan	OPD	184.953.552,00		12 Bulan	185.000.000,00
2	1 8	01	2.0 8	0 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Pendukung Non PNS	49 Orang	OPD		Jumlah Pendukung Non PNS	49 Orang	OPD			49 Orang	1.089.678.676,00
2	1 8	01	2.0 8	0 3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Unit	50 Jenis	OPD	149.480.000,00	Jumlah Unit	50 Jenis	OPD	149.480.000,00		50 Jenis	149.480.000,00
2	1 8	1	2.0 9		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Pemeliharaan BMD			322.850.000,00				322.850.000,00			322.850.000,00

2	1 8	1	2.0 9	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Pemeliharaan Kendaraan	48 Unit	OPD	263.620.000,00	Jumlah Unit Pemeliharaan Kendaraan	48 Unit	OPD	263.620.000,00		48 Unit	263.620.000,00
2	1 8	1	2.0 9	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit	60 Unit	OPD	59.230.000,00	Jumlah Unit	60 Unit	OPD	59.230.000,00		60 Unit	59.230.000,00
2	1 8	2			Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Jumlah Investor (PMA/PMDN)			99.999.800,00				99.999.800,00			1.200.000.000,00
2	1 8	2	2.0 2		Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota				99.999.800,00				99.999.800,00			850.000.000,00
2	1 8	2	2.0 2	2	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	OPD	99.999.800,00	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	OPD	99.999.800,00		1 Dokumen	500.000.000,00
2	1 8	02	2.0 2	0 1	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya review naskah Akademis dan PERBUP									2 dokumen	350.000.000,00
2	1 8	02	2.0 1		Penetapan Pemberian Fasilitas / Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota											350.000.000,00
2	1 8	02	2.0 1	0 1	Penetapan Kebijakan Daerah mengenai pemberian fasilitas/Insentif dan kemudahan Penanaman Modal	Tersedianya dokumen kajian kebijakan daerah perundangan di bidang penanaman modal										-

2	18	02	2.01	02	Evaluasi pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan kemudahan Penanaman Modal	Tersedianya dokumen arah kebijakan penanaman modal								1 Dokumen	350.000.000,00
2	18	3			Program Promosi Penanaman Modal	Jumlah Investor (PMA/PMDN)		700.000.000,00				700.000.000,00			700.000.000,00
2	18	3	2.01		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			700.000.000,00				700.000.000,00			700.000.000,00
2	18	2	2.02	2	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Mengikuti pameran promosi dalam daerah, luar daerah, dalam negeri dan luar negeri	3 Event		700.000.000,00	Mengikuti pameran promosi dalam daerah, luar daerah, dalam negeri dan luar negeri	3 Event	Dalam dan Luar daerah	700.000.000,00		500.000.000,00
2	18	03	2.01	02	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Terlaksananya promosi penanaman modal								1 Dokumen	200.000.000,00
2	18	4			Program Pelayanan Penanaman Modal	Jumlah Penerbitan Izin		399.788.000,00				399.788.000,00			1.100.000.000,00
2	18	4	2.01		Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			399.788.000,00				399.788.000,00			1.100.000.000,00

2	1 8	4	2.0 1	1	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah izin yang diterbitkan	40 Izin	Dalam dan Luar daerah	100.000.000,00	Jumlah izin yang diterbitkan	40 Izin	Dalam dan Luar daerah	100.000.000,00		500 permohonan	300.000.000,00
2	1 8	4	2.0 1	2	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah izin yang diterbitkan	40 Izin	Dalam dan Luar daerah	100.000.000,00	Jumlah izin yang diterbitkan	40 Izin	Dalam dan Luar daerah	100.000.000,00		500 izin	300.000.000,00
2	1 8	4	2.0 1	3	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah izin yang diterbitkan	40 Izin	Dalam dan Luar daerah	99.788.000,00	Jumlah izin yang diterbitkan	40 Izin	Dalam dan Luar daerah	99.788.000,00		500 aduan	200.000.000,00
2	1 8	4	2.0 1	4	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah izin yang diterbitkan	40 Izin	Dalam dan Luar daerah	100.000.000,00	Jumlah izin yang diterbitkan	40 Izin	Dalam dan Luar daerah	100.000.000,00		500 izin	300.000.000,00
2	1 8	5			Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Kenaikan /Penurunan Nilai Realisasi PMDN			635.173.000,00				635.173.000,00			900.000.000,00
2	1 8	5	2.0 1		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				635.173.000,00				635.173.000,00			900.000.000,00
2	1 8	5	2.0 1	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Perusahaan yang dipantau	20 Perusahaan	Dalam dan Luar daerah	210.000.000,00	Jumlah Perusahaan yang dipantau	20 Perusahaan	Dalam dan Luar daerah	210.000.000,00			200.000.000,00
2	1 8	5	2.0 1	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Perusahaan yang dibina	20 Perusahaan	Dalam dan Luar daerah	210.000.000,00	Jumlah Perusahaan yang dibina	20 Perusahaan	Dalam dan Luar daerah	210.000.000,00			250.000.000,00
2	1 8	5	2.0 1	3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Perusahaan yang diawasi	20 Perusahaan	Dalam dan Luar daerah	215.173.000,00	Jumlah Perusahaan yang diawasi	20 Perusahaan	Dalam dan Luar daerah	215.173.000,00			450.000.000,00

											daerah				
2	18	6			Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Jumlah Aplikasi			191.904.000,00				341.904.000,00	150.000.000,00	500.000.000,00
2	18	6	2.01		Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				191.904.000,00				341.904.000,00	150.000.000,00	500.000.000,00
2	18	6	2.01	1	Pengelolaan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha terintegrasi secara Elektronik	Jumlah data dan informasi Perizinan dan Non Perizinan	69 Dokumen	Dalam dan Luar daerah	191.904.000,00	Jumlah data dan informasi Perizinan dan Non Perizinan	69 Dokumen	Dalam dan Luar daerah	341.904.000,00	150.000.000,00	orang dan aplikasi 500.000.000,00

BAB V. PENUTUP

Rencana Kerja (RENJA) yang merupakan dokumen yang akan dijadikan acuan dan pedoman dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Kartanegara, diharapkan dapat menunjang pencapaian visi Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara ***“Terwujudnya Kabupaten Kutai Kartanegara yang Maju, Mandiri, Sejahtera dan Berkeadilan”***

Dalam mengantisipasi adanya perubahan lingkungan yang sangat kompleks, pesat dan tidak menentu, maka selama kurun waktu berlakunya Renja 2022 ini, dapat dilakukan upaya kajian dan bila perlu dilakukan penyesuaian-penyesuaian seperlunya.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 ini dapat tercapai bila dilaksanakan dengan penuh dedikasi dan kerja keras, oleh sumber daya manusia di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Kartanegara, sehingga hasilnya diharapkan mampu memberikan kontribusi positif bagi upaya Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam rangka merencanakan pembangunan daerah dan menciptakan *good governance*.

Demikian Rencana Kerja (RENJA) ini disusun dengan harapan dapat dianalisis dan dipertimbangkan dalam R-APBD Tahun Anggaran 2022 mendatang.

Tenggarong, 12 Agustus 2021
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kab. Kutai Kartanegara, 

H. BAMBANG ARWANTO, AP., M.Si
NIP. 19740111 199311 1 002